

DINAMIKA PEROLEHAN SUARA PDI PADA PEMILU PASCA FUSI 1973 DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA

**(UNTUK MENELITI SEBAB-SEBAB TERJADINYA KONGRES MEDAN
DAN HUBUNGANNYA DENGAN SEJARAH PDI)**

SKRIPSI

KK
Fis. P 7 / 99.
Wid
d.



MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

OLEH :

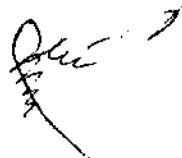
BAKTI WIDODO

NPM : 079113333

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Semester Gasal Tahun 1997/1998**

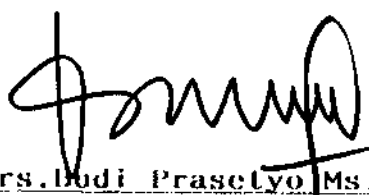
Skripsi ini telah selesai diujikan dihadapan
panitia penguji pada tanggal : .3../...1../1997

Ketua Penguji



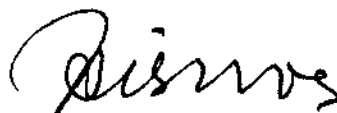
Drs. Hariyadi
Nip.131 653 466

Anggota



Drs. Dudi Prasetyo Msi
Nip.131 918 696

Anggota



Drs. Wisnu Pramutanto P.
Nip.131 453 124

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Predikat PDI bermasalah memang tidak berhenti dan menjadi kemelut berkepanjangan dibawah kepemimpinan Megawati dan kemudian Soerjadi.

PDI adalah asset bangsa, asset nasional. Karena itu kemelut apapun yang terjadi dalam tubuh PDI seharusnya merupakan kerugian bagi kepentingan nasional, demi kian banyak pernyataan resmi kita dengar. Konsep asset bangsa dan asset nasional itu dibuktikan dengan "kepedulian" banyak pihak untuk "menentramkan" PDI agar tidak terus menerus dilanda kemelut, agar tidak bermasalah. Namun yang terjadi "kepedulian" itu ternyata tidak memupuskan kemelut. Ditingkat nasional ada upaya membentuk PDI tandingan, diberbagai daerah juga demikian, dan di Jawa Timur soalnya lebih rumit lagi karena ada dua kepemimpinan PDI Jatim, yang akhirnya "dapat diselesaikan" dengan menghadirkan orang ketiga yaitu Dimmy Haryanto. Dilihat secara normal, tidak bisa dibayangkan bagaimana sebuah partai akan mampu mengkonsolidasikan diri terutama dalam menghadapi pemilu apabila kemelut dan

masalah berkepanjangan itu tidak dapat diselesaikan apakah oleh internal PDI sendiri maupun melalui political will pihak eksternal, dalam hal ini pemerintah. Kalau PDI adalah asset bangsa, apakah tidak senyatanya kemelut yang dialami asset tersebut diselesaikan agar tidak sampai menimbulkan kerugian bagi stabilitas politik nasional.

Bukan saja stabilitas politik tapi apa yang terjadi didalam tubuh PDI sekarang ini adalah gambaran dari bagaimana sesungguhnya kultur politik kita dewasa ini ditengah-tengah derasny arus semangat kemandirian, semangat keterbukaan, dan berkembangnya semangat demokrasi. PDI adalah kitab pelajaran berharga, yang kalau kita mau menyimak dan mengkajinya, betapa besar nilai pengetahuan yang dapat kita pelajari dari kasus PDI untuk membuktikan bagaimana sesungguhnya kultur politik kita dewasa ini.

Aktor-aktor yang membentuk kultur politik itu tidak saja orang-orang PDI sendiri, tapi juga aktor lainnya seperti pemerintah, intelektual, bahkan aktor dari kekuatan politik lainnya. Interaksi berbagai aktor tersebut telah membentuk suatu kultur politik, yang kalau mau jujur sungguh tidak kondusif bagi pendidikan politik karena tidak terbukanya koridor untuk melihat lengkap politik kita demi kepentingan pendidikan politik

dimasa depan.

Pragmatisme, interes pribadi maupun institusional, avonturisme, rendahnya political will, semua itu bukan tidak mungkin merupakan faktor didalam menyulut kemelut berkepanjangan ditubuh PDI dewasa ini. Sebuah partai yang sah, yang seharusnya dibina dan dibesarkan demi kepentingan demokratisasi politik bangsa, harus mengalami konflik berkepanjangan justru ketika suatu proses politik bagi demokrasi akan berlangsung. Bagi kepentingan pembangunan kultur politik masa depan, nasib buruk berkepanjangan ditubuh PDI sebagai peserta pemilu adalah suatu noktah hitam dalam sejarah demokrasi kita.